

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Harian Pagi
Terbit 8 Halaman
Eceran Rp 1.200

Kedaulatan Rakyat on line: <http://www.kedaulatan-rakyat.com>

LETJEN (PURN) KEMAL: BOHONG KALAU PANGAB TAK TAHU

Segera Mahmilubkan Prabowo

YOGYA (KR) - Ketua Barisan Nasional Letjen Purn Kemal Idris mengatakan, setelah Letjen Prabowo mengakui kesalahannya dan terbukti kecerobohnya, ia harus segera di-Mahmilubkan. Namun demikian, walaupun penculikan yang disertai dengan penganiayaan terhadap aktivis pro-demokrasi akibat kesalahannya, tidak tertutup kemungkinan Prabowo hanya menjalankan perintah dari atasannya.

"Yang memberikan perintah penculikan kemungkinan bisa Soeharto atau Feisal Tanjung atau lainnya. Jika Soeharto memang terbukti bersalah, ia juga harus dituntut," tandas Kemal kepada wartawan di sela-sela pelaksanaan Semiloka "Mencah Platform Gerakan Reformasi Menuju Kesatuan dan Persatuan Bangsa" di Auditorium Graha Sabha Pramana UGM, Kamis (13/8).

Diikuti Kemal, perintah resmi penculikan dan berbagai tindak pelanggaran HAM di Aceh, Irian Jaya dan lainnya tidak mungkin keluar dari ABRI. Kemal sendiri menolak pernyataan Feisal Tanjung bahwa dalam Kopassus ada bagian yang

tidak dapat dimasukinya saat ia menjabat Pangab. "Bohong itu. Semua operasi intelijen dapat diketahui. Sebagai Pangab, Feisal dapat mengetahui segala hal dalam tubuh Kopassus," tegas Kemal dengan nada tinggi.

Dijelaskan Kemal, BKO sebelum diputuskan, dibicarakan dulu dalam staf. Setelah itu komandan mengambil keputusan dan memberikan perintah kepada bawahannya untuk dilaksanakannya. Dalam hal ini, komandan memang diizinkan un-

Kemal mengatakan, akibat dari tindakannya menculik dan menyiksa para aktivis, Prabowo dapat dihukum puluhan tahun atau hukuman mati. "Dan jika ia dihukum lebih dari tiga tahun saja, ia akan dikeluarkan secara tidak hormat dari ABRI sehingga karir militernya akan habis," tambah Kemal.

Dapat terkesan dilaksanakan secara serius. Diminta pendapatnya, mantan Danrem 072/Pamungkas Kolonel (Purn) Soemarto menjelaskan, istilah itu memang sudah ada sejak dulu. Namun BKO itu baru dilaksanakan belakangan ini saja. "Sewaktu saya jadi Danrem, belum pernah ada perintah BKO," jelas Soemarto, Danrem 2 pertama.

Dijelaskan, BKO tersebut dapat dilaksanakan untuk mengatasi suatu kejadian di suatu daerah, baik yang bersifat teritorial maupun tempur. Pimpinan ABRI dapat menerjunkan satuan dari ketiga angkatan dan Polri untuk pelaksanaan BKO itu. Pimpinan ABRI kemudian menunjuk salah satu komandan dari kesatuan, untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas operasi. "Perintah itulah yang disebut Bawah Kendali Operasi," tambahnya.

* Bersambung hal 8 kol 7



DEMO DI BINA GRAHA: Untuk pertamakalinya muncul demo di depan tempat kerja Presiden, yakni Bina Graha. Sekitar 50 pemuda kemarin berusaha masuk Bina Graha, tapi dicegat aparat keamanan sehingga mereka hanya bisa berorasi di luar pagar untuk memprotes Perpu No 2/1998. Peristiwa ini berlangsung di saat Presiden Habibie bersiap-siap menerima rombongan PDI Soerjadi dan menyebabkan jalan depan Bina Graha macet.

BERAPA JAM ANDA TAHAN?
SAAT KRISMON SAATNYA KERJA KERAS, JANGAN SAMPAI ANDA KEKURANGAN VITAMIN

TINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH DENGAN ENERVON-C

MEMBANTU MENINGKATKAN DAYA TAHAN & STAMINA TUBUH

PENGUSAHA YOGYA SIAP TURUN KE JALAN

Sultan: Apa Maunya Pemerintah Pusat?

YOGYA (KR) - Kalau persoalan yang mengganjal dalam penerapan Gubernur DIY adalah soal jabatan seumur hidup, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan masalah itu bisa dibicarakan. Tapi, jangan bicara untuk memaksakan kehendak. "Terus terang, saya tidak tahu persis apa maunya pemerintah Pusat," tegasnya.

Hal tersebut dikemukakan Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada wartawan di UGM, menanggapi pertanyaan seputar penetapan Gubernur DIY, Kamis (13/8). Yang penting, tambahannya, kalau Pusat mau melaksanakan apapun keputusannya, sosialisasikan lebih dulu kepada rakyat Yogyakarta.

Menyinggung soal undangan pertemuan dengan Presiden BJ Habibie, terus terang dikemukakan belum ada jadwal jelas. "Kemarin Rabu (12/8) dan sekarang, jelas saya tidak dapat memenuhi undangan itu. Karena saya sudah *kadhung* janji di sini," ungkapnya. Mungkin, tambahannya, pertemuan itu akan dilaksanakan pekan depan, yang pasti setelah 17 Agustus.

Ditanya apakah keistimewaan DIY itu hanya sebutan seperti di Jakarta dan Aceh? Bagaimana mungkin Presiden BJ Habibie memberi otonomi lebih pada Timor Timur. "Kalau di DIY saja yang sudah istimewa mau dihapus, mana mungkin pemerintah memberi otonomi yang lebih besar pada Timor Timur yang masih menjadi pembicaraan internasional? Tidak logis kan," paparnya.

Sri Sultan: Pak Harto Ingkar Janji

YOGYA (KR) - Keberpihakan pada reformasi diakui Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai sebuah kewajiban, karena Pak Harto sebagai pemimpin sudah ingkar janji. Sebagai pemimpin bangsa seharusnya Pak Harto dapat

menyayangi dan membuat *ayem* rakyat, namun yang terjadi adalah sebaliknya dan sebagian besar rakyat makin miskin. Menurutnya, aksi 21 Mei hanya merupakan puncak, karena sebelumnya melalui pidato-pidato sudah sering menyinggung soal ingkar janjinya Pak Harto.

Sri Sultan mengemukakan hal tersebut dalam Semiloka Nasional hari-2 "Mencah Platform Gerakan Reformasi Menuju Persatuan dan Kesatuan Bangsa" yang diprakarsai BKS- IKAPTISI di Graha Sabha Pramana, Kamis (13/8). Dalam kesempatan itu Sri Sultan juga meminta tolong pada rakyat agar mencari pemimpin masa

datang yang memahami nilai-nilai yang ada di Republik Indonesia. Karena kalau terlalu lama berada di luar negeri, bagaimana ia mengetahui nilai-nilai yang ada. Selain itu pemimpin tersebut juga harus memiliki visi, legitimasi dan dipercaya internasional supaya dapat berbicara globalisasi.

Dalam hal ini paparnya, saya selalu mengingat salah satu di antara 4 pesan almarhum ayah yang mengharuskan untuk lebih berani mengatakan yang benar itu benar. "Pesan yang dikemukakan sebelum orang tua saya wafat itu saya interupsi, mengapa ada kata *harus lebih berani*. Ternyata, * Bersambung hal 8 kol 4

KOLOM - 9
Ulama DIY Silaturahmi

PAKET BULAN MERDEKA
Sambungan Telepon Baru + Gratis Fitur
Dari Tanggal 1 s/d 31 Agustus 1998

DISKON 50% diberikan kepada calon pelanggan di Jateng & DIY yang memenuhi salah satu syarat di bawah ini:

- Veteran pejuang
- Lahir tahun 1945
- Lahir tanggal 17 Agustus (berumur 17 th pd 1998)

Diskon 50% juga diberikan khusus kepada 17 area pelayanan terpilih.

Konfirmasi ketersediaan sambungan telepon hubungi 162 atau kunjungi Yantel terdekat.

PERTANGGUNGJAWABAN SOEHARTO
Harmoko: Tergantung MPR

"Jadi Presiden Saja, Jangan Cuma Gubernur"